



RINGKASAN

DIAH PURWITOSARI. Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Besar Pertambangan Non Migas. Dibimbing oleh RINA OKTAVIANI dan MUHAMMAD FIRDAUS.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat menjadi sumber penerimaan pajak yang besar. Namun demikian tax ratio Indonesia termasuk di dalamnya sumber daya alam non migas berada dibawah tax ratio rata rata negara anggota ASEAN. Data masuknya arus investasi asing di Indonesia menunjukkan bahwa pada sektor primer, pertambangan non migas adalah sektor yang paling diminati. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa wajib pajak badan yang memiliki komposisi modal asing pada struktur modalnya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang pertambangan non migas terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia yang telah menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment* membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Upaya peningkatan tingkat kepatuhan tersebut dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan melalui pemeriksaan pajak yang terencana sehingga hasilnya efektif dan efisien. Perencanaan pemeriksaan berdasarkan risiko perlu dilakukan mengingat terdapat keterbatasan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini menganalisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak besar pertambangan non migas di Indonesia. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memaksimalkan utility penghasilannya. Analisis menggunakan regresi logistik ordinal digunakan untuk mengetahui hubungan antara *Return On Investment* (ROI), *Debt to Equity Ratio* (DER), asset, dan status pemeriksaan dengan tingkat risiko ketidakpatuhan. Hasil analisis regresi logistik ordinal tersebut kemudian digunakan untuk menentukan bentuk perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menyimpulkan pendapat pakar mengenai prioritas bentuk ketidakpatuhan serta faktor-faktor yang digunakan untuk mendeteksinya.

Berdasarkan regresi logistik ordinal ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkatan risiko ketidakpatuhan dengan ROI, dan status wajib pajak pernah diperiksa. Hasil lainnya menunjukkan adanya indikasi perilaku *thin capitalization* berdasarkan besarnya DER. Prioritas bentuk ketidakpatuhan dari hasil penelitian ini secara berurutan adalah praktik *outbound transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *inbound transfer pricing*. Keseluruhan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak besar pertambangan non migas yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat rencana pemeriksaan berdasarkan risiko.

Kata kunci: Ketidakpatuhan pajak, ROI, *transfer pricing*, *thin capitalization*